

Membangun Keterlibatan Masyarakat di Sekolah;

Sebuah Pengalaman Dalam Penerapan APBS Partisipatif di SMP PAB 18 Medan¹

Oleh: Drs.H. SURIONO ASNAN, M.Pd²

Pengantar

Dalam makalah ini saya ingin menyampaikan beberapa hal pokok berkenaan dengan proses penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) Partisipatif di SMP PAB 18. Saya merasakan bahwa pengalaman yang kami lalui selama kurang-lebih 3 (tiga) bulan, dari pertemuan ke pertemuan, dari diskusi ke diskusi, cukup melelahkan karena memang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Akan tetapi usaha itu berujung pada sebuah dokumen APBS yang sudah rampung, dan yang lebih menggembirakan adalah bahwa APBS SMP PAB 18 Medan untuk Tahun Ajaran 2011/2012 disusun bersama dan menjadi milik kami bersama, milik kepala sekolah, guru, pegawai, masyarakat, dan milik PAB.

Walaupun hingga saat ini, penerapan APBS Partisipatif ini masih pada tahap perencanaan, kami meyakini bahwa setengah dari keberhasilan sudah ditangan. Setelah ini, kami akan berjalan pada tahap berikutnya, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Tentunya, pengalaman selama 3 bulan dalam merampungkan tahap perencanaan merupakan sesuatu yang berharga untuk kami. Dalam prosesnya, kami menentukan secara bersama arah dan tujuan, program dan kegiatan untuk guru, siswa, bersama masyarakat. Dengan itu kami merencanakan kegiatan yang merupakan kebutuhan bersama, yang diangkat berdasarkan permasalahan yang nyata, dan dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Dalam proses perencanaan ini, saya benar-benar merasakan hakikat pendidikan, dimana saya juga belajar bersama guru dan masyarakat untuk menggali masalah, menganalisis, memahami, dan mencari jalan penyelesaian bersama. Kemudian juga saya merasakan persinggungan dan interaksi yang semakin intensif dengan masyarakat. Persinggungan ini membuat kami semakin memahami kondisi masyarakat, melalui dialog-dialog yang terjadi dengan orangtua siswa, dan tokoh masyarakat. Interaksi ini juga menciptakan suasana baru di tengah masyarakat, saya, para guru, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam satu lingkup masyarakat. Dengan pertemuan-pertemuan itu, komentar, pertanyaan, dan pendapat dari orangtua, tokoh masyarakat, menunjukkan dukungan dan harapan yang penuh kepada sekolah untuk kembali memasyarakatkan diri. Sementara itu kami juga mengharapkan dukungan dari masyarakat untuk memberikan kritik dan saran kepada sekolah. Kesalingberharapan ini bagi kami menciptakan kesalingpercayaan antara masyarakat dan sekolah sebagai pengikat hubungan yang tidak terpisahkan, sekolah untuk masyarakat, dan masyarakat yang bersekolah.

¹ Disampaikan pada Diskusi Publik "Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Anggaran Pendidikan" yang diselenggarakan oleh SAHdaR – SeGI Medan – SMP PAB 18 Medan – SDN 067250 Medan. Hotel Madani Medan, 22 Maret 2011.

² Kepala SMP Persatuan Amal Bakti (PAB) 18 Medan.

Sebelum menguraikan pengalaman dalam proses yang telah kami lalui, saya akan menceritakan sekilas tentang sejarah pendirian organisasi Persatuan Amal Bakti (PAB). Sebagai insan yang lahir, dibesarkan, dan kini menjadi pendidik di sekolah PAB, timbul kewajiban kepada saya untuk menyampaikan latar belakang kemunculan PAB, baik karena gagasan yang dibawanya, maupun karena kiprahnya dalam memajukan pendidikan.

Sedikit Tentang Sejarah Persatuan Amal Bakti (PAB)

Agaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Saya dan PAB mempunyai tanah tumpah darah yang sama, di daerah Klumpang. Daerah ini, kampung halaman kami adalah daerah Perkebunan Tembakau Deli. Pada waktu itu masa awal kemerdekaan, orde lama, masyarakat di daerah Klumpang, masyarakat pedesaan perkebunan ini merupakan masyarakat yang terbelakang secara sosial, ekonomi, dan pendidikan. Kondisi masyarakat buruh perkebunan tembakau ini menggugah tokoh-tokoh masyarakat untuk melakukan perbaikan di masyarakat. Mereka adalah Al Ustadz M. Dahlan Fauzy, M. Mu'min, M. Yatim merintis usaha untuk perbaikan masyarakat melalui pendidikan, dakwah, serikat tolong menolong.

Usaha-usaha untuk melakukan perubahan di masyarakat ini kemudian terorganisasi dengan baik, dan berkembang mejadi satu bentuk organisasi. Dalam bidang pendidikan, kemajuan pertama ditunjukkan dengan pendirian Madrasah Diniyah Amal Bakti, dan SMP di yang pertama di Perkebunan Tembakau Deli pada tahun 1957. Secara keorganisasian, PAB sudah menunjukkan bentuk sejak tahun 1956. Kemudian pada tahun 1958, didirikan juga PGAP dan kursus-kursus yang diasuh oleh guru-guru PAB. Perkembangan selanjutnya, PAB mendirikan sekolah-sekolah di luar daerah Klumpang. Di tahun 1959, didirikan SD PAB yang pertama di Helvetia sementara madrasah-madrasah terus berkembang.

Dinamika perkembangan PAB pun kian menuju perkembangan yang mengarah pada kemajuan dan perluasan wilayah cakupan PAB. Hingga kini, PAB telah berdiri di beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, dari Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kota Medan, dan Kabupaten Deli Serdang. Secara keseluruhan, PAB mempunyai 29 unit SD, 19 unit SMP, 5 unit SMA, 6 unit SMK, 5 unit MTs, dan 4 unit MAS.

Apa yang dapat dipetik dari perkembangan PAB ini ialah posisi masyarakat dalam mendukung usaha PAB. Kesadaran masyarakat dalam memandang pentingnya pendidikan telah menjadi tenaga pendorong bagi PAB. Terlebih, PAB adalah organisasi yang lahir dari masyarakat dan dibangun untuk perbaikan kondisi masyarakat. Dalam hal ini PAB adalah cita-cita masyarakat dan menjadi harapan masyarakat. Oleh karena itu, PAB bersama masyarakat dan didukung masyarakat, menyelenggarakan pendidikan yang diperuntukkan bagi kemajuan masyarakat.

Saya melihat posisi masyarakat dan PAB ini sebagai sebuah hubungan yang didasari kesalingpedulian. Kepedulian masyarakat atas kondisinya sendiri, dan kepedulian masyarakat akan usaha-usaha organisasi untuk masyarakat. Maka kepedulian yang bersambut ini menjadi bangunan pendidikan yang khas, pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, dilaksanakan dengan partisipasi (baca : kritik, sumbangsaran, dan perhatian) masyarakat, dan dilaksanakan

untuk kemajuan masyarakat itu sendiri. Pola hubungan yang timbal balik ini tentu saja sangat kontadiktif dengan pola instruksi. Hubungan yang dialogis antara masyarakat dan PAB sudah pasti tidak senada dengan hubungan yang instruksional. Hal ini karena hubungan dialogis menciptakan inisiatif, kreatifitas masyarakat, sementara hubungan yang instruksional menghilangkan inisiatif dan kreatifitas. Agaknya sistem “instruksi” orde baru di dunia pendidikan telah menjadi pondasi bagi kemunduruan pendidikan, karena hilangnya hubungan yang dialogis antara sekolah dan masyarakat. Hari ini, partisipasi masyarakat sudah benar-benar tenggelam, tidak ada sikap yang saling peduli dan saling perhatian, masyarakat disibukkan dengan aktivitasnya sendiri di tengah gejolak ekonomi, sekolah juga sibuk dengan kegiatan rutin pendidikan, yang berulang.

Perkenalan dengan APBS Partisipatif

Pada November 2010 awalnya saya berkenalan dengan APBS partisipatif. Tim Serikat Guru Indonesia (SeGI) Kota Medan dan SAHdaR membawa konsep ini ke sekolah kami di Kelurahan Mabar Hilir. Mereka menyosialisasikan konsep dan teknis pelaksanaan APBS partisipatif kepada saya, guru, dan pegawai. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) Partisipatif seperti yang disampaikan oleh Tim Sosialisasi adalah hal baru bagi kami di SMP PAB 18 Medan. Tambahan kata “partisipatif” pada APBS merupakan kata baru bagi kami. Seperti yang disampaikan, dan yang saya pahami, APBS Partisipatif adalah perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengevaluasian Program, Kegiatan, dan Anggaran Sekolah yang dilakukan oleh Beberapa Pihak yang menjadi Stake Holder Sekolah, seperti pemerintah/yayasan, Kepala Sekolah, Guru, Pegawai, Orangtua Siswa, Perusahaan di sekitar sekolah (jika ada), dan Organisasi Masyarakat.

Selama kurang-lebih satu jam kami berdiskusi tentang konsep APBS Partisipatif dalam sosialisasi tersebut. APBS partisipatif, dalam kebersamaannya, dapat mengakomodasi semua kebutuhan stakeholder sekolah. Dalam sosialisasi ini juga disampaikan bahwa keterampilan untuk penerapan APBS Partisipatif akan diberikan kepada perwakilan stakeholder sekolah dalam pelatihan APBS Partisipatif.

Akhirnya dalam komunikasi yang intens dengan SeGI dan SAHdaR, dan kesepahaman yang terjalin, SMP PAB 18 menjadi salah satu dari sembilan sekolah yang menjadi mitra SeGI dalam pelatihan APBS Partisipatif. SMP PAB 18 mengirimkan 4 (empat) orang perwakilannya untuk mengikuti pelatihan pada tanggal 14 – 16 Januari 2011. Perwakilan sekolah kami terdiri dari guru, pegawai, dan masyarakat.

Penyusunan APBS secara Partisipatif

Pasca pelatihan, peserta yang mewakili sekolah kami sudah diberikan keterampilan dalam menyusun anggaran sekolah secara partisipatif. Dari sembilan sekolah akan dipilih dua sekolah sebagai model penerapan APBS Partisipatif. Pada pertemuan tanggal 29 Februari 2011 antara

SeGI, SAHdaR, dan sembilan sekolah, akhirnya sekolah kami dipilih menjadi salah satu dari dua sekolah model. Kemudian, penyusunan APBS di SMP PAB 18 dimulai pada tanggal 5 Februari 2011.

Penyusunan APBS secara partisipatif diawali dengan perumusan visi dan misi sekolah. Dengan tetap berlandaskan pada visi dan misi PAB, kami merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah berdasarkan kekhususan masalah di sekolah dan masyarakat di sekitar sekolah. Visi, misi, dan tujuan yang dirumuskan bersama ini kemudian akan menjadi dasar bagi seluruh program dan kegiatan yang akan disusun dalam APBS. Secara ringkas dalam skema, saya gambarkan tahapan yang kami lalui dalam penerapan APBS Partisipatif.



Dalam seluruh tahapan, kami jalani bersama antara guru, pegawai, tokoh masyarakat, dan orangtua siswa. Seluruh tahap tersebut antara lain perumusan visi, misi, dan tujuan sekolah, kemudian penyusunan program dan kegiatan sekolah, penyusunan anggaran sekolah, sosialisasi draft APBS, dan pengesahan Draft APBS. Dari semua prosesnya, masyarakat dan orangtua siswa terlibat penuh dan secara aktif mendiskusikan, memberikan masukan, dan kritik terhadap sekolah.

Dari tahapan yang dilalui tersebut, banyak kesulitan yang kami hadapi untuk mengumpulkan stakeholder dalam satu waktu. Kendalanya adalah sulit mencari waktu yang tepat diantara mereka yang mempunyai kesibukan yang berbeda. Masalah lainnya adalah kesulitan dalam menyusun rencana program dan kegiatan, dan anggaran karena para stakeholder yang belum terbiasa. Sebagai metode yang baru dalam perencanaan program sekolah, penerapan APBS partisipatif cukup sulit untuk dimulai, terlebih dengan banyaknya masalah yang dihadapi sekolah dan keterbatasan dana sekolah untuk membiayai program yang disusun.

Optimisme Dalam Keterbatasan Anggaran

Sejauh ini perencanaan telah rampung disusun. Beberapa program rutin dan non rutin terangkum dalam APBS. Saya, dan kami semua, memang tidak membatasi program-program dan kegiatan yang akan direncanakan, melainkan semua diakomodasi, semua permasalahan harus diselesaikan. Kenyataannya memang anggaran yang tersedia sangat terbatas. Bahkan pengeluaran kami sebesar dua kali penerimaan dalam satu tahun. Akan tetapi, dalam APBS Partisipatif ini, kami menggunakan paradigma baru dalam menyusun anggaran, yaitu “anggaran mengikuti program”. Paradigma ini kami yakini sebagai jalan untuk pencapaian visi dan misi sekolah.

Jika sebelumnya, kegiatan sekolah yang dijalankan adalah program-program rutin yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan atau anggaran sekolah. Kami menyebutnya sebagai paradigma lama, yaitu “program mengikuti anggaran.” Maksudnya ialah program atau kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dibatasi dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan sekolah. Hal inilah yang selama ini membuat sekolah tidak bergerak maju dalam mencapai tujuan-tujuan sekolah. Oleh karena itu pula, kegiatan-kegiatan sekolah selama ini, nyaris tanpa terobosan baru, dan cenderung mengulang kegiatan-kegiatan sebelumnya. Hal ini yang tidak mungkin dipertahankan dalam kondisi masyarakat yang semakin cepat berubah, dan inovasi teknologi yang semakin cepat. Jika paradigma lama ini dipertahankan, maka sekolah akan tertinggal dalam akselerasi perubahan masyarakat dan teknologi yang tinggi.

Akan tetapi dalam paradigma yang baru, “anggaran mengikuti program,” masalah yang terjadi adalah besarnya pengeluaran tidak sebanding dengan penerimaan. Daya akomodasi dalam model yang partisipatif ini memang dapat menampung semua permasalahan, yang akan diselesaikan dengan program dan kegiatan. Dalam hal inilah, keterbatasan anggaran menjadi masalah baru dalam model partisipatif ini.

Namun dalam beberapa pertemuan, saya menyaksikan bahwa orangtua dan masyarakat memberikan dukungan penuh atas keterbukaan anggaran sekolah. Dari itu pula kami menjadi optimis bahwa keterbukaan anggaran sekolah akan membuka jalan bagi upaya-upaya menyukseskan program yang kami susun. Kami juga meyakini bahwa keterbukaan anggaran sekolah dapat membuka jalan bagi kerjasama-kerjasama program yang kami rencanakan, membuat para guru dan masyarakat juga semakin gigih berusaha untuk menjalin hubungan dengan pihak lain, tentunya dalam usaha melaksanakan program sekolah. Optimisme ini, biarpun dikatakan terlalu percaya diri dalam keterbatasan anggaran, tapi ia didapatkan dari proses yang panjang dalam membangun partisipasi masyarakat di sekolah.

Penutup

Akhirnya, cerita singkat mengenai penyusunan APBS Partisipatif di SMP PAB 18 ini saya sudahi. Tugas selanjutnya bagi kami adalah mengimplementasikan program yang sudah kami rencanakan. Tentunya semua ini tidak berjalan tanpa rasa pengabdian yang tulus. **“Beramal Dalam Kebersamaan, Berbakti Bersama Mencapai Tujuan.”** Wassalam.